

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Tunggu Konsep Pemindahan Ibu Kota

: Kamis, 22 Agustus 2019 **Tanggal**

Surat Kabar : Indo Pos

Halaman : 2

DPR Tunggu Konsep Pemindahan Ibu Kota

PR RI menunggu pemerintah untuk menyerahkan konsep perencanaan pemindahan ibu kota. Bahkan, para wakil rakyat itupun mempertanyakan soal undang-undang wacana yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Pasalnya, dikhawatirkan rencana pemindahakan ibu kota Indonesia ke Kali-matan masih mentah.

"SEKARANG ini posisinya masih di tingkat eksekutif, di pemerintah. Tentu ini bukan hal yang sederhana ya, tapi kita beri kepercayaan kepada pemerintah untuk membuat perencanaan sebaik mungkin sematang mungkin," kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/8).

Politikus Partai Golkar itu menyebut, wacana pemindahan ibu kota baru disampaikan secara lisan oleh Presiden RI Jokowi saat si-dang tahunan MPR RI. Jokowi meminta izin pada parlemen untuk memindahkan ibu kota. "Baru sebatas itu," tandasnya. Setelah draf diserahkan ke DPR, lanjut-

nya, maka DPR akan melakukan pembahasan.

nya, maka DPR akan melakukan pembahasan. Pembahasan utama adalah soal undang-undang (UU). Saat ini, UU masih menyatakan DKI Jakarta adalah ibu kota indonesia. Kendati konsep belum diserahkan pemerintah, Amali meyakini, wacana ini adalah, wacana serius. Pasalnya, wacana ini disampaikan secara terbuka oleh Jokowi dalam sidang parlemen. Proses pembahasan pemindahan jihu kota itu, dimuai dari konsen dan dahan ibu kota itu dimulai dati konsep dan genyampaian rancangan undang-undang (RUU) ke pimpinan dewan. Setelah itu, konsep dan RUU itu disampaikan

dalam sebuah rapat paripurna. Selanjutnya, diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus). "Ya, kita berikan kesempatan saja kepada pemerintah untuk merencanakan dan

melaksanakan hal yang sudah disam-paikan secara terbuka oleh Bapak Presi-den," terang Amali. Ia menyatakan, Komisi II DPR RI tak

akan memberikan target atau tenggat waktu soal konsep pemindahan ibu kota. Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto

juga menagih UU terkait pemindahan ibu kota. Politikus PAN itu menyebut, untuk melakukan pemekaran kabupaten atau kota di Komisi II, butuh naskah akademik dan kajian lengkap, Namun, sampai hari ini DPR belum menerima hal tersebut.

"Sampai hari ini pemerintah belum mengajukan undang-undang untuk memindahkan ibu kota. Sava kira itu hal ibu kota. Saya kira itu hal yang vital, hal yang urgent kalau memang mau memin-dahkan," ujarnya di Kom-pleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/8).

Yandri menyebut, UU Jakarta sebagai Ibu Kota perlu dicabut. Pemerintah juga perlu menge-luarkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah terkait status aset di Jakarta. Maka itu, Yandri menilai, pemerintah belum secara resmi melakukan pemindahan ibu

kota karena naskah RUU belum disampai-kan kepada DPR. Sebab, bila belum ada aturan tersebut tapi sarana prasarana sudah dibangun, hal itu merupakan pe-

nyimpangan.
"Enggak ada perintah undang-un-dang untuk memerintahkan ibu kota. Negara kan bukan milik presiden, bukan milik Pak Jokowi secara kepala

pemerintahan, tapi dia dipe-rintah oleh undang-undang," jelasnya.

Ketua DPP PAN itu me-nilai, perlu adanya kajian mendalam terkait wacana pemindahan ibu kota. Yakni, apakah benar-benar diperlukan atau tidak. Sebab, anggaran yang besar bisa saja untuk Ihu Kota

Menurutnya, fraksi di DPR sepakat akan pemindahan ibu kota. Namun, secara pri-badi menilai, hal ini belum saatnya dilakukan mengingat kondisi utang negara dan ekonomi yang sedang sulit. "Kita sepakat, gak ada masalah, dan wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi, haruskah sekarang? Utang

Sementara, Wakil Ketua DPR Fadli Zon ber-pendapat, rencana pemindahakan Ibu Kota Indonesia ke Kalimatan masih mentah. Dia juga menyebut, rencana pemindahan ibu kota Indonesia itu belum berupa rencana yang

matang.
Politikus Partai Gerindara itu juga mengatakan, akibat gembar-gembor Jokowi yang hendak memindahkan Ibu Kota Indo-nesia, membuat masyarakat bingung. Fadli Zon menyatakan, rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia yang belum jelas itu sebagai persoalan amatiran. (aen)